

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian. Setidaknya ada 2 objek penelitian yang akan dijelaskan yaitu Kabupaten Brebes dan terdapat dua sub bab, yakni : 1.) Peta Politik Kabupaten Brebes; 2.) Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dan Keluarga Bupati yang biasa disebut keluarga “Dewi Sri”.

2.1 Kabupaten Brebes

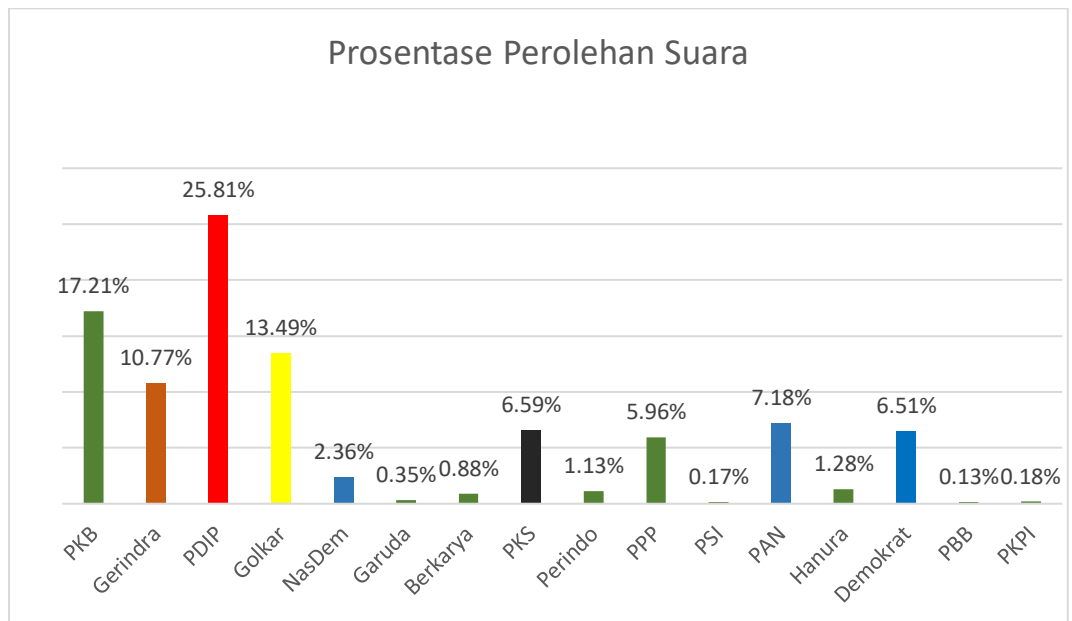
2.1.1 Peta Politik Kabupaten Brebes

Tabel 2.1 Perolehan Suara DPRD Kabupaten Brebes Pemilu Tahun 2019

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
BREBES 1 (100%)	33.154	18.201	37.789	35.358	2.387	941	2.336	8.808	1.805	7.293	381	7.988	352	14.985	332	752
BREBES 2 (100%)	39.728	19.137	41.695	19.309	4.564	386	955	14.488	1.193	8.940	392	25.324	141	7.718	157	174
BREBES 3 (100%)	14.161	16.840	52.241	28.423	4.619	516	1.436	7.960	1.149	14.278	183	8.453	575	14.806	138	87
BREBES 4 (100%)	25.299	14.176	53.351	15.284	2.195	275	1.331	9.209	896	5.525	216	8.800	192	5.761	334	281
BREBES 5 (100%)	19.918	18.375	42.741	21.682	5.542	843	1.400	8.303	1.589	8.846	246	10.207	9.747	6.156	141	281
BREBES 6 (100%)	38.531	20.187	28.356	13.809	4.133	499	1.254	16.618	4.539	14.293	228	10.442	1.729	15.199	196	257

Sumber : KPU Kabupaten Brebes

Gambar 2.1 Prosentase Perolehan Suara DPRD Kabupaten Brebes Pada Pemilu 2019



Sumber : KPU Kabupaten Brebes

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel diatas, diperoleh informasi bahwa Partai PDIP menjadi Partai pemenang pemilu DPRD Kabupaten Brebes dengan memperoleh prosentasi suara sebanyak 25,81%. Nomor dua disusul oleh Partai PKB dengan prosentase suara sebanyak 17,21%, dan disusul oleh Partai Golkar di urutan ketiga dengan memperoleh prosentase suara sebanyak 13,49%.

Dari data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa Partai PDIP masih sangat dominan dalam perpolitikan Kabupaten Brebes. Dengan menjadi partai pemenang di Pemilu DPRD Kabupaten Brebes tahun 2019, membuktikan bahwa Partai PDIP masih memiliki pengaruh yang kuat di Kabupaten Brebes. Bahkan dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin berhasil menjadi pemenang di wilayah Kabupaten Brebes. Berikut penulis sajikan data perolehan suara pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2019 :

Tabel 2.2 Perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Paslon 1	Perolehan Suara Paslon 2	Keterangan(Surat Rusak / Tidak Sah)
		Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH MA'RUF AMIN	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	
1	Jatibarang	31144	16046	1310
2	Wanasari	64601	23063	1392
3	Tanjung	43981	11800	438
4	Larangan	64151	22141	466
5	Brebes	64560	32768	2328
6	Bulakamba	68555	23435	2059
7	Banjarharjo	52070	18362	1394
8	Ketanggungan	55803	23796	0
9	Songgom	31447	10546	1117
10	Tonjong	24461	14613	241
11	Bumiayu	37437	22929	1153
12	Losari	56150	18135	0
13	Kersana	27743	9708	0
14	Sirampog	21457	15355	2335
15	Salem	17916	18859	601
16	Paguyangan	42990	16104	1840
17	Bantarkawung	33563	19534	716
	JUMLAH	738029	317194	17390
	Prosentase	69,94%	30,06%	2%

Sumber : KPU Kabupaten Brebes

Peran partai PDIP dalam memenangkan paslon nomor 1 yaitu Jokowi dan Ma'aruf sangat berpengaruh. Besarnya dukungan masyarakat Kabupaten Brebes terhadap Partai PDIP membuat Partai PDIP dapat berkuasa di Kabupaten Brebes. Selain itu dukungan dari partai koalisi seperti PKB dan Golkar membuat pasangan Jokowi dan Ma'ruf menang telak atas pasangan Prabowo dan Sandi.

Jika dilihat dari data perolehan suara pada Pemilu DPRD Kabupaten Brebes Partai koalisi yang mengusung Jokowi dan Ma'ruf menempati urutan pertama, kedua dan ketiga yaitu PDIP, PKB, dan Golkar. sehingga dengan adanya data perolehan suara pada Pemilu DPRD Kabupaten Brebes dan juga Pilpres tahun 2019 dapat diketahui bahwa peta politik Kabupaten Brebes dominan dikuasai oleh Partai PDIP dan PKB.

2.1.2 Sekretariat Daerah kabupaten Brebes

Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Setda Kabupaten Brebes merupakan salahsatu satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang ada di kabupaten Brebes. Berdasarkan Perda Kabupaten Brebes No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes, Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Setda mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 10 Tahun 2016, susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Brebes terdiri atas :

1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - Subbagian Pemerintahan Umum;
 - Subbagian Otonomi Daerah;
 - Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama.
 - b. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 - Subbagian Keuangan dan Aset Desa;
 - Subbagian Perangkat Desa.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

Subbagian Agama dan Sosial;

Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.

2. Asisten Sekda Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

Subbagian Sumberdaya Alam dan Energi;

Subbagian Sarana Perekonomian;

Subbagian Investasi dan BUMD.

b. Bagian Pembangunan, terdiri dari :

Subbagian Bina Program;

Subbagian Administrasi Pembangunan Daerah;

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :

Subbagian Bina Program dan Verifikasi;

Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Subbagian Pelaporan, Advokasi, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

3. Asisten Sekda Bidang Administrasi, terdiri dari :

a. Bagian Hukum, terdiri dari :

Subbagian Perundang-undangan;

Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

b. Bagian Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

Subbagian Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi;

Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

c. Bagian Umum, terdiri dari :

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bupati;

Subbagian Rumah Tangga dan Protokol
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

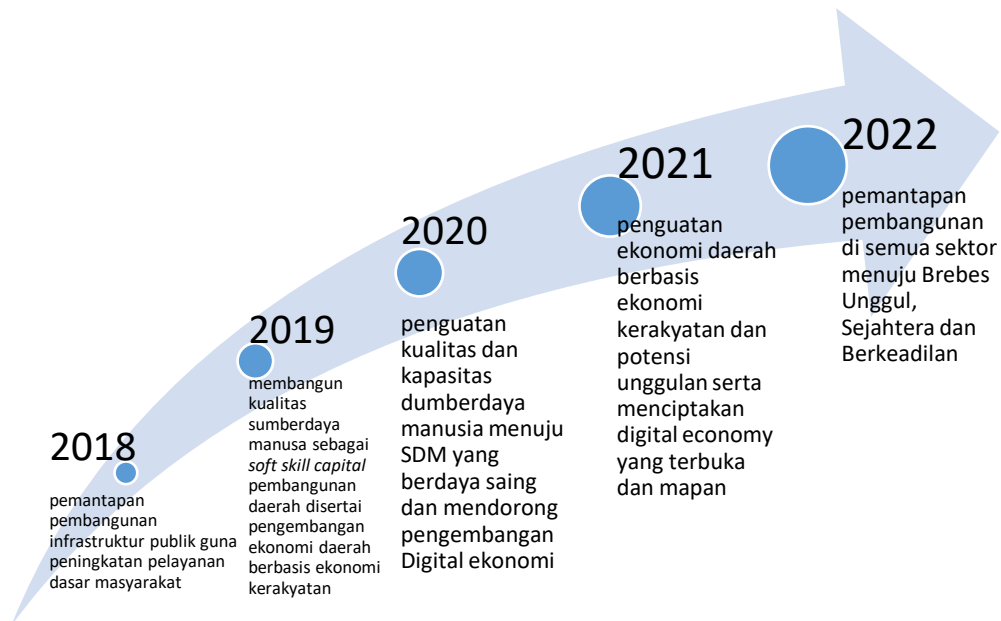
2.1.2.1 Arah Kebijakan

Untuk memberikan pedoman arah yang konkrit bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Brebes untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah ini ditetapkan sebagai tahapan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, yang akan dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ini juga menjadi pedoman dalam penentuan prioritas usulan pembangunan daerah yang bersumber dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Penelaahan hasil pokok-pokok pikiran DPRD selama masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes dan Renja Perangkat Daerah untuk setiap tahunnya (Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022).

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Brebes



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022

Tabel 2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022

2018	2019	2020	2021	2022
Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Publik Guna Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Soft Skill Capital Pembangunan Daerah, Disertai Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Penguatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju SDM Yang Berdaya Saing, dan Mendorong Pengembangan Digital Economy	Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan serta Menciptakan Digital Economy yang Terbuka dan Mapan	Pemantapan Pembangunan Daerah di Semua Sektor Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan
1. Peningkatan pelayanan dasar pendidikan	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi	1. Pemantapan perluasan akses dan mutu pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi
2. Peningkatan pelayanan kesehatan	2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama sumberdaya kesehatan	2. Pemantapan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan pada prasarana dan sarana serta sumberdaya kesehatan

<p>3. Pengembangan produksi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan potensi UMKM berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>3. Perkuatan ekonomi Daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja</p>	<p>3. Perkuatan ekonomi Daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy yang didukung peningkatan infrastruktur produksi, perkuatan inovasi serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja</p>	<p>3. Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan perkuatan inovasi, pengembangan digital economy, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan start up bisnis baru</p>	<p>3. Pemantapan perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan pada sektor dan komoditas unggulan daerah, pemantapan inovasi, digital economy, ekonomi kreatif, serta kualitas dan kapasitas tenaga kerja, dan penciptaan start up bisnis baru</p>
<p>4. Pengembangan inovasi daerah, seni budaya, pariwisata, kreativitas muda, dan olahraga</p>	<p>4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>4. Perkuatan pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>

5. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	5.Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	5.Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	5.Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	5.Pemantapan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah
7. Peningkatan daerah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta penciptaan stabilitas daerah				
8.Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan				

pelayanan publik serta penciptaan stabilitas daerah				
--	--	--	--	--

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022

2.2 Keluarga “Dewi Sri”

Sejarah PO Dewi Sri dirintis oleh H. Ismail dan Hj. Rokhayah yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Idza Priyanti, Ikmal Jaya dan Mukti Agung Wibowo dan ketiga putra dan putri pendiri PO Dewi Sri ini pernah menjadi kepala daerah di beberapa kabupaten di Jawa Tengah(<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 08.00 WIB)

Bapak Ikmal Jaya adalah putera dari pendiri PO Dewi Sri yang juga pernah menjadi Walikota Tegal ke 16 periode jabatan 2009-2013. Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 14 Juli 1973 pada tahun 2003, melihat sebuah peluang yang sangat terbuka untuk mengembangkan usahanya di bidang transportasi di Jakarta. Dan salah satu keberhasilannya adalah dengan mengelola bus angkutan Bumi Serpong Damai (BSD), Kemang Pratama, Lippo Karawachi, Bintaro Jaya dan Bukit Sentul(<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 08.02 WIB)

Bermula dari armada angkutan inilah yang pada perkembangannya menjadi cikal bakal Feeder Bus yaitu bus yang berfungsi memasok penumpang Bus Trans Jakarta (TJ), di bawah PT. Wifend Dharma Persada(<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 08.04 WIB)

Pada saat itu bapak Ikmal Jaya juga bertindak sebagai direktur utama sekaligus Ia juga menjadi direktur utama P.O. Dewi Sri yang merupakan usaha dari orang tuanya.

Ibu Idza Priyanti merupakan anak ketiga dari pendiri PO Dewi Sri yang merupakan perusahaan transportasi terbesar di Tegal. Wanita kelahiran Pesurungan Kulon Kota Tegal, Jawa Tengah, 09 Januari 1971 ini sempat menjadi Wakil Bupati (Wabup) Brebes periode 2007 – 2012 dan saat ini menjadi Bupati Brebes ke 31 masa jabatan 2012-2017 dan menjabat periode keduanya 2017 – 2022

(<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 08.06 WIB).

Selain berkerja dipemerintahan Idza Priyanti juga merupakan Direktur utama PO Dewi Sri yang sejak dulu di didirikan oleh orang tua H. Ismail dan Hj. Rokhayah. Direktur PO Dewi Sri ini sempat terkena kasus dimana pada 31 Oktober 2012 pemohon pasangan Calon Bupati Agung Widyantoro-Athoillah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) permasalahan ijazah milik Hj. Idza Priyanti dan Narjo yang dianggap diragukan keabsahannya (<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 08.07 WIB)

Seperti saudara lainnya Bapak Mukti Agung Wibowo, pria kelahiran Tegal, 2 Oktober 1976 yang sempat menjadi Direktur Perusahaan Otobus Dewi Sri pada tahun 2010 sebelum memutuskan untuk terjun kedalam politik menjadi Wakil Bupati Pemalang mendampingi Bupati Bp. Junaedi tahun 2010 (<https://ayonaikbis.com/bus-dewi-sri-dan-dinasti-politik/3355> diakses pada tanggal 12 pukul 08.08 WIB)

PO Dewi Sri sendiri didirikan oleh H. Ismail dan Hj. Rokhayah, yang kemudian perusahaan ini di wariskan oleh anak – anaknya yaitu Idza Priyanti, Ikmal Jaya, dan Mukti Agung Wibowo. Terdapat hal yang menarik perhatian masyarakat dimana, ketiga anaknya mampu menduduki jabatan strategis dengan menjadi kepala daerah di tiga daerah yang berbeda yaitu di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Hal ini menandakan ada niatan tersendiri dari keluarga besar PO Dewi Sri untuk menguasai daerah Tegal dan sekitarnya dengan menempatkan keluarganya menjadi kepala daerah di Tegal dan sekitarnya. Bisnis keluarga PO Dewi Sri yang bisa dibilang sukses dibidang transportasi darat lantas tidak memberikan rasa puas terhadap apa yang telah di raih oleh keluarga Dewi Sri. Ketiga anak dari pendiri PO Dewi yang sekaligus menjabat sebagai direktur utama, mengekspansi bisnisnya ke ranah politik lokal. Ekspansi bisnis dengan terjun ke ranah politik yang dilakukan oleh keluarga PO Dewi Sri bisa dikatakan cukup berhasil. Terbukti dengan terpilihnya ketiga anaknya menjadi kepala daerah di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Saat ini yang tersisa menduduki jabatan publik dari keluarga Dewi Sri adalah Idza Priyanti, yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes. Sekaligus mampu menjabat sebagai Bupati Brebes selama dua periode. Penempatan Idza Priyati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Brebes bukan tanpa alasan. Pasalnya jika dilihat dari bisnis keluarga Dewi Sri di bidang transportasi sedang meredup. Ditambah dengan tersandungnya kasus korupsi oleh Ikmal Jaya pada saat menjabat sebagai Wali Kota Tegal. Idza Priyanti seperti menjadi harapan bagi keluarga Dewi Sri untuk menyelamatkan nama dan sekaligus sebagai pengaman kekuasaan dan pengaruh di Tegal Raya sekaligus sebagai pengaman kekayaan keluarga Dewi Sri

2.2.1 Bisnis Keluarga “Dewi sri”

Ada berbagai bisnis yang dijalankan oleh keluarga “Dewi Sri” selain bisnis transportasi bus, bisnis-bisnis tersebut antara lain :

- a. PO Dewi sri
- b. Bahari water Park Tegal
- c. Kontraktor pengembang perumahan yang tersebar di wilayah Kota tegal, Kabupaten Brebes, dan Bandung